

ABSTRAK

Penelitian ini berupaya untuk mengevaluasi penggunaan *e-procurement*, pengendalian internal, kompetensi pejabat pengadaan dalam mencegah *fraud* pengadaan dengan efek moderasi dari variabel *whistleblowing system*. Sumber data merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Teknik analisis data menggunakan *Partial Least Square* (PLS) dengan bantuan program Warp-PLS. Populasi penelitian adalah pejabat pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada perangkat daerah di Madura. Sampel penelitian berjumlah 155 responden.

Hasil menunjukkan bahwa penggunaan *e-procurement* dan kompetensi pejabat pengadaan secara signifikan mengurangi kemungkinan *fraud* dalam pengadaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan *e-procurement* sudah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip efektif, efisien, terbuka, bersaing, dan adil, kemudian pejabat pengadaan telah memiliki keterampilan teknis, pengetahuan tentang prosedur pengadaan dan Undang-Undang serta memiliki pengalaman profesional yang memadai. Sementara itu, pengendalian internal tidak memiliki pengaruh dalam mencegah *fraud* pengadaan, yang menunjukkan bahwa indikator-indikator pernyataan terkait pengendalian internal tidak semua terpenuhi terutama terkait adanya pakta integritas. Selain itu, temuan juga menunjukkan bahwa efek moderasi dari *whistleblowing system* dapat memperlemah *e-procurement* dan pengendalian internal dalam mencegah *fraud* pengadaan. Sedangkan *whistleblowing system* tidak mampu memoderasi pengaruh kompetensi pejabat pengadaan terhadap *fraud* pengadaan.

Kata Kunci : *e-procurement*, pengendalian internal, kompetensi pejabat pengadaan, pencegahan *fraud*

ABSTRACT

This study seeks to evaluate the use of e-procurement, internal control, and competence of procurement officials in preventing procurement fraud with the moderating effect of whistleblowing system variables. Source data is the primary data obtained through the dissemination of questionnaires. Data analysis technique using partial least squares (PLS) with the help of the Warp-PLS program. The study population was procurement officials and commitment-making officials (PPK) in the regional apparatus in Madura. The sample was 155 respondents.

The results showed that the use of e-procurement and the competence of procurement officials significantly reduced the likelihood of fraud in procurement. This shows that the implementation of e-procurement has been carried out in accordance with the principles of effective, efficient, open, competitive, and fair; then the procurement officer has technical skills, knowledge of procurement procedures and laws, and has sufficient professional experience. Meanwhile, internal control has no effect in preventing procurement fraud, which shows that the indicators of statements related to internal control are not all fulfilled, especially related to the integrity pact. In addition, the findings also indicate that the moderating effect of the whistleblowing system can weaken e-procurement and internal control in preventing procurement fraud. While the whistleblowing system is not able to moderate the influence of the competence of procurement officials against procurement fraud.

Keywords : *e-procurement*, internal control, competence of procurement officials, fraud prevention